



Strategi Rekrutmen Kepemimpinan Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Pematang Siantar

Muhammad Ichsan*, Junaidi, Farhan Indra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Strategi;
Rekrutmen;
Perempuan;
Partai Keadilan Sejahtera

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang strategi rekrutmen Partai Keadilan Sejahtera Kota Pematang Siantar terhadap keterwakilan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi rekrutmen dan strategi menumbuhkan aspek kepemimpinan terhadap calon kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pematang Siantar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui analisis deskriptif untuk menggambarkan strategi rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pematang Siantar dalam merekrut calon-calon kader perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara sebagai data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pematang Siantar dalam merekrut calon kader perempuan bersifat terbuka dengan menggunakan dua strategi rekrutmen: Pertama, pola rekrutmen individual yang dilakukan dengan metode pendekatan orang per orang (*al-da'wah al-fardiyyah*). Kedua, pola rekrutmen institusional yang dilakukan dengan metode berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap partai yang berstatus formal ataupun tidak formal (*al-da'wah al-jama'i*).

Keywords

Keywords: Strategy;
Recruitment;
Women;
Partai Keadilan Sejahtera

Abstract

This journal discusses the recruitment strategy of the Prosperous Justice Party in Pematang Siantar City for women's representation. This study aims to determine the strategy of recruitment and strategy of cultivating the leadership aspect of female cadre candidates for the Prosperous Justice Party (PKS) in Pematang Siantar City. This study uses a qualitative research type through descriptive analysis to describe the recruitment strategy carried out by the Prosperous Justice Party (PKS) in Pematang Siantar City in recruiting female cadre candidates. Data collection techniques used through interviews as primary data and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the Prosperous Justice Party (PKS) in Pematang Siantar City is open in recruiting female cadre candidates using two recruitment strategies: First, the individual recruitment pattern is carried out using the person-to-person approach (*al-da'wah al-fardiyyah*). Second, the pattern of institutional recruitment which is carried out by affiliated methods with various party wing organizations with formal or informal status (*al-da'wah al-jama'i*).

*Corresponding Author: **Muhammad Ichsan**, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: muhammadichsan2001@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.386>

History Artikel:

Received: 16 Agustus 2023 | Accepted: 28 September 2023

PENDAHULUAN

Perempuan adalah makhluk tuhan yang banyak memegang posisi yang mulia. Perannya sebagai ibu

rumah tangga di keluarga sangat berpengaruh besar dalam menciptakan generasi yang tangguh. Perempuan dengan keistimewaan dan kekurangannya memiliki karakter tersendiri dalam hal memimpin. Perempuan tetap dapat

berkiprah untuk bangsa dan negara tanpa meninggalkan tugasnya seagai ibu rumah tangga dan serang istri bagi keuanganya (Hayati, 2010).

Kewajiban negara yang terkait dengan hak politik perempuan juga terdapat dalam Rekomendasi Umum Komite CEDAW No.23 (sidang ke-16 tahun 1997) tentang perempuan dalam kehidupan publik. Komite tersebut memberikan rekomendasi bahwa negara peserta wajib: *pertama*, menjamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara untuk melindungi hak perempuan. *Kedua*, menjamin bahwa partai politik dan serikat buruh tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. *Ketiga*, melakukan identifikasi dan melaksanakan tindakan khusus sementara untuk menjamin partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki, *keempat*, adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menduduki jabatan publik yang didasarkan atas pemilihan (*public elected positions*) (Luhulima dan Irianto, 2006).

Dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi “bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu untuk setiap daerah pemilihan umum paling sedikit 30% keterwakilan perempuan” dalam artian bahwa pemerintah menghimbau perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan demikian, diperlukan usaha dan upaya yang sistematis dan terprogram dalam meningkatkan kapasitas politik bagi kaum perempuan. Salah satu organisasi yang memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas politik bagi kaum perempuan adalah partai politik, salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Susanti, 2015).

Hal yang menarik untuk diteliti adalah PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memiliki sistem kaderisasi kepartaian yang sistematis dan metodik. Kaderisasi memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pembinaan terhadap seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan secara terbuka melalui infrastruktur kelembagaan partai yang tersebar dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Fungsionarisasi partai berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia dalam internal kepartaian (Budiardjo, 2010).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu diantara banyak partai baru yang memiliki ideologi islam yang mampu mengembangkan sayapnya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir dari gerakan tarbiyah dari beberapa kampus di Indonesia. Gerakan tarbiyah pada awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul diawal 1980an di era Orde Baru. Gerakan tarbiyah dapat dipahami sebagai suatu alternatif dari berbagai macam gerakan islam.

Pada pemilu 1999 Partai Keadilan (PK) menduduki peringkat tujuh diantara 48 partai politik beserta pemilu. Hasil tersebut tidak memiliki dalam mencapai ketentuan *electoral threshold*, sehingga tidak dapat mengikuti pemilu ditahun 2004 kecuali berganti nama dan lambang. Akibat kegagalan tersebut Partai Keadilan (PK) bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Assyaukanie, 2011).

Secara teoritis, rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik di suatu negara. hal ini disebabkan proses rekrutmen politik memiliki peranan yang penting dalam menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik dalam suatu negara melalui lembaga-lembaga dinegara tersebut. Oleh sebab itu, tercapai atau tidak tercapainya tujuan sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik.

Rekrutmen politik merupakan seleksi, pemilihan, atau seleksi pengangkatan seseorang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik dan sistem pemerintahan di sebuah negara demokrasi. Dalam rekrutmen politik, partai politik umumnya memiliki cara sendiri dalam perekrutan calon anggota. Rekrutmen merupakan sebuah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk diperkerjakan dalam suatu organisasi (Andani, 2019). Kegiatan-kegiatan terorganisir secara sistematis oleh PKS dilakukan secara rutin, dengan harapan bahwa peserta-peserta baru dapat memiliki nilai dan pemahaman yang sama.

Penelitian tentang dinamika Partai Keadilan Sejahtera sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain: (1) Anies Rasyid Baswedan, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera, antara lain adalah sebagai berikut: pertama, sejak awal berdiri dikiprah politik Indonesia, PKS menghindari ketergantungan terhadap tokoh tertentu. Kedua, PKS relatif mampu mengelola perbedaan di internal partai sehingga terhindar dari perpecahan. Ketiga, PKS tidak memiliki hubungan politik masa lalu sehingga PKS tidak memiliki

beban sejarah. Keempat, PKS tidak mempresentasikan salah satu dari dua organisasi islam mainstream yakni NU dan Muhammadiyah. Kelima, PKS menyiasati jumlah kursinya yang masih relatif kecil diparlemen dengan mengintensifkan aktivitas layanan kepada masyarakat yang kemudian di institusionalisasikan dalam bentuk organisasi sayap (wajihah). Keenam, PKS mengakses para anggota sampai kelevel terbawah sampai sepanjang waktu, terutama melalui pertemuan rutin halaqoh setiap minggu. Ketujuh, PKS tidak berfokus dalam upaya mengadopsi syariah secara formal dalam bentuk perundang-undangan, melainkan memusatkan perhatian pada dakwah untuk mengedukasi umat mengenai syariah (Baswedan, 2004).

Fitriyani (2018) dalam artikelnya yang berjudul "*Peran Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Politik*" mengkaji peran dan pengalaman perempuan anggota DPD PKS di Kota Semarang. Penelitian ini membahas bagaimana perempuan di PKS berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi dan politik.

Mubarok (2017) mengulas "*Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*" dalam penelitiannya. Studi ini mengeksplorasi bagaimana perempuan berperan dalam kepemimpinan PKS dan apa strategi yang digunakan oleh partai untuk mendukung perempuan dalam peran kepemimpinan.

Firdaus (2019) dalam penelitian berjudul "*Kepemimpinan Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bengkalis*" membahas kepemimpinan perempuan di tingkat kabupaten. Studi ini memberikan wawasan tentang peran perempuan dalam tingkat lokal dalam konteks PKS.

Rohmah dan Lubis (2017) mengambil studi kasus di Kota Medan dalam penelitian berjudul "*Kepemimpinan Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*". Mereka menggali peran dan strategi perempuan dalam PKS di kota tersebut.

Adnan (2018) dalam artikelnya yang berjudul "*Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Rekrutmen Kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Utara*" menjelaskan strategi pemberdayaan perempuan dalam konteks PKS di Sumatera Utara. Penelitian ini memberikan perspektif dari daerah yang berbeda di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pencarian informasi atau data yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita dalam bentuk naratif (Yusuf, 2014). Metode kualitatif banyak digunakan dalam penelitian ilmu politik disebabkan karena mampu menghasilkan data secara deskriptif baik secara lisan maupun tulisan. Dengan metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat mengupas dan menggambarkan secara jelas mengenai Strategi Partai Keadilan Sejahtera Kota Pematang Siantar dalam melakukan proses rekrutmen terhadap kader perempuan di kota Pematang Siantar.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung atau terjun kelapangan yang dilakukan oleh penulis. Salah satunya yaitu dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab untuk menggali informasi atau data terhadap beberapa nara sumber yang diantaranya adalah bapak Jumali selaku ketua DPW PKS Kota Pematang Siantar, bapak Kusnan selaku Kader PKS kota Pematang Siantar, bapak Suhadi selaku Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pematang Siantar dan ibu Jannah selaku Kepala Bidang Perempuan (Kabidpuan) DPW PKS Kota Pematang Siantar.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan telaah dokumen, yaitu dengan usaha yang dilakukan oleh penulis untuk mencari literatur atau referensi yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Biasanya berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental lainnya (Sugiyono, 2011).

Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah nama sebuah partai islam di indonesia. Sebelum mentransformasikan diri menjadi PKS, PK adalah nama partai yang dibentuk pada tahun 1998. Nama PK berubah menjadi nama PKS disebabkan oleh karena tidak terpenuhinya *electoral threshold*. PKS didirikan

djakarta di hari sabtu tepatnya pada tanggal 9 jumadil awal atau bertepatan dengan tanggal 22 april 2002. PKS merupakan partai yang berasaskan islam dan merupakan partai dakwah. Hal ini dikarenakan pembentukan PKS berangkat dari niat untuk melakukan tugas dakwah dibidang politik (Yuniartin, 2018).

Pada saat deklarasi, PKS memiliki pengurus di 30 DPW, 312 DPD, dan 2155 DPC, diseluruh indonesia. Selain itu, PKS memiliki 13 perwakilan diluar negeri yang disebut dengan PUSAT INFORMASI KEADILAN SEJAHTERA (PI-PKS) (Rahmat, 2008). Sebagai partai politik, PKS selain memiliki DPD dan DPC serta DPR, PKS juga mengembangkan lembaga-lembaga pelayanan, dakwah dan pengembangan kader, dan mengembangkan *social capital* berbentuk lembaga maupun organisasi-organisasi masyarakat madani yang cukup solid (Rahmat, 2008).

Kelahiran PKS dapat dibagi kedalam tiga tahapan. *Pertama*, fase dakwah kampus, para aktivis umumnya yang berusia muda yang bergerak dari dalam kampus dan dalam skala terbatas yaitu disekolah-sekolah rohani islam. Para aktivis mahasiswa tersebut mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dengan Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut adalah memberikan pemahaman dasar-dasar islam dengan penekanan pada penanaman semangat islam. *Kedua*, pelembagaan gerakan mahasiswa, pada perkembangannya LDK semakin berkembang terutama dikampus-kampus umum dan beberapa kampus islam. Mesjid-mesjid kampus menjadi pusat kegiatan dakwah dan dihadiri banyak mahasiswa untuk ikut serta dalam lingkaran kecil kajian agama (*halaqoh*). Sehingga pada pertemuan Forum Silahtrahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), beberapa aktifis mengumumkan pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI). *Ketiga*, gerakan politik, gerakan politik ini dimotori oleh para aktivis KAMMI, alumni LIPIA, alumni Saudi Arabia dan alumni Timur Tengah lainnya (Yuniartin, 2018).

Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Visi yang dicita-citakan oleh Partai Keadilan Sejahtera terhadap indonesia adalah “terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat” (Platform, 2007).

Secara harfiah masyarakat Madani (*civil society*) merupakan sebuah gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat madani merupakan terjemahan dari bahasa inggris yakni (*civil society*). Istilah *civil society* sudah ada sejak sebelum masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah *civil society* adalah Ciceru sebagai seorang orator di zaman yunani kuno. *Civil society* menurut Ciceru merupakan suatu komunitas politik yang beradap seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility* (kewargaan) dan *urbanity* (budaya kota), maka kota difahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan (Syahminan, 2009).

Konsep masyarakat madani merupakan esensi dari pada Piagam Madinah yang dibentuk oleh nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah sebagai konstitusi negara madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk dikota Madinah. Landasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Semua umat islam adalah satu kesatuan, walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan.
2. Hubungan intern komunitas muslim dan hubungan ekstern antar komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan oleh prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati, dan saling menghormati kebebasan beragama.

Terwujudnya masyarakat Madani yang merupakan intisari dari pada piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegaraan nabi Muhammad SAW yang tidak hanya mementingkan umat islam, namun juga mengakomodasi kepentingan orang-orang yahudi serta mempersatukan kedua umat serumpun (islam dan yahudi) dibawah kepemimpinannya (Katimin, 2017).

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang tepat dan seimbang serta tidak melewati batas. Hal ini disebut sikat moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrim “mengurangi dan melebihi (*ifrath dan tafriith*). Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang tebebas dari rasa

takus secara psikis yang sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar secara fisik yang sejahtera.

Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan secara elegan sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain.

Konsep masyarakat madani menurut partai Keadilan sejahtera tidak terlalu jauh dari konsep Rasulullah SAW yang membentuk masyarakat yang cemerlang. Dalam artian kehidupan masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, memiliki semangat ketuhanan yang Maha Esa harus terwujud kualitas pribadi yang ditandai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa penghormatan terhadap hak asasi manusia, perwujudan negara hukum, partisipasi negara yang luas dalam pengambilan kebijakan publik diberbagai tingkatan serta pelaksanaan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menafsirkan bahwa konsep masyarakat madani yang adil dan sejahtera menjadi sebuah platform-platform dalam membangun Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Adapun misi yang di emban oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:

- A. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.
- B. Mendorong penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dan layak bagi manusia untuk menghapuskan kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan serta kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin dan sektor informal.
- C. Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Terciptanya masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat memwadahi dan membantu proses pembangunan yang berkelanjutan (Platform, 2007).

Strategi Rekrutmen Kader PKS Di Pematang Siantar

Proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan organisasi partai politik. Hal ini dikarenakan tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas. Tersedianya orang-orang yang memiliki integritas yang mumpuni dalam menggerakkan roda organisasi adalah suatu keniscayaan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menghasilkan kader partai politik seperti yang diharapkan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik. Sistem rekrutmen merupakan hal yang penting sebab di tahap ini partai politik mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya sistem rekrutmen partai politik, akan terdapat seleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk dikembangkan, maka akan direkrut oleh partai politik (Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017).

Partai Keadilan Sejahtera menggunakan dua strategi dalam melakukan rekrutmen politik. *Pertama* dilakukan dengan menggunakan pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardiyyah*), atau bentuk pendekatan orang perorang yang meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diminta berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir oleh Partai Keadilan Sejahtera. Seperti *usroh* (keluarga), *halaqoh* (kelompok studi), *liqo* (pertemuan mingguan), *rihlah* (rekreasi), *mukharyam* (perkemahan), *daurah* (pelatihan intelektual), dan *nadwah* (seminar). Sistem yang digunakan oleh partai keadilan sejahtera dalam melakukan sistem rekrutmen partai politik mirip dengan sistem rekrutmen gerakan islamis di Mesir.

"PKS Kota Pematang Siantar tentunya menggunakan pola rekrutmen individual dalam melaksanakan kaderisasi. Rekrutmen individual atau disebut dengan al-da'wah al-fardiyyah merupakan suatu konsep pendekatan yang dilakukan oleh pengurus Partai Keadilan Sejahtera Kota Pematang Siantar dalam berkomunikasi secara individu atau secara pribadi dengan calon kader yang akan direkrut. Dalam artian tugas ini dilakukan oleh pengurus atau kader PKS Kota Pematang Siantar dengan mengatasnamakan pribadi setiap kader dan tidak dalam suasana yang formal." (Jumali, 2023)

Kedua pola rekrutmen yang dipakai oleh PKS dalam melakukan perekrutan kader adalah dengan melakukan pola rekrutmen institusional (*al-da'wah jama'i*). Partai Keadilan Sejahtera berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal maupun tidak formal, sehingga partai dapat memanfaatkan institusi-institusi untuk meraup kader potensial. Rekrutmen *jama'i* juga bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain seperti majelis ta'lim, sekolah ibu, studi intensif, kegiatan ramadhan, pelatihan, bakti sosial, santunan, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Seluruh jenis rekrutmen ini berorientasi menjadi pintu masuk bagi calon kader untuk menjadi peserta tarbiyah level pemula.

“PKS Kota Pematang Siantar juga menggunakan pola rekrutmen institusional atau dalam bahasa arabnya *al-da'wah jama'i*. Pola rekrutmen institusional merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan oleh kader PKS Pematang Siantar terhadap calon yang akan dikaderkan namun menggunakan pola yang formal. Rekrutmen institusional disebut juga dengan istilah pola kultural. Artinya kader-kader PKS dalam merekrut anggota masyarakat dilakukan melalui media dakwah dan pranata budaya. Secara sederhana pola tersebut terikat dengan strategi-strategi partai yang bersifat formal namun humanis. Jadi bedanya pendekatan individu (*Al-da'wah al-fardhiyah*) dan pendekatan institusional (*Al-da'wah al-jama'i*) adalah dalam hal suasana dan strategi. Kalau pendekatan individu (*Al-da'wah al-fardhiyah*) itu bersifat tidak terlalu formal dan tidak terikat dengan suasana program partai. Seperti contoh, mengajak keponakan untuk bergabung di PKS Pematang Siantar, itu kan tidak formal dan tidak terikat pada program-program kerja partai. Kalau pendekatan institusional (*Al-da'wah al-jama'i*) itu bersifat formal karena terikat kepada program-program kerja partai. Sebagai contoh, melakukan sunatan massal atau kerja bakti sekaligus memperkenalkan PKS kepada masyarakat, nah itu harus bersifat formal, berada dalam suasana formal dikarenakan sedang terikat dalam aturan dan program-program kepartaian.” (Jumali, 2023).

Setelah itu Partai Keadilan Sejahtera mewajibkan kader-kadernya untuk terlibat aktif dalam pelatihan hirarkis (*marhalah*). Pembinaan ini mencakup proses pembelajaran (*ta'lim*), pelatihan keorganisasian (*tanzhim*), pembinaan karakter (*takwin*), dan evaluasi (*taqwim*). Pola pembinaan kader Partai Keadilan Sejahtera yang paling terkenal adalah

dengan menggunakan pembinaan pola tarbiyah yang lebih dikenal dengan kegiatan *liqo* (pertemuan) dan *mentoring*. Menurut konsepsi Partai Keadilan Sejahtera, tarbiyah merupakan *core* (inti) dari segala aktifitas kepartaian. Apapun yang dilakukan memiliki nilai pembinaan atau pendidikan dalam meningkatkan kualitas keislaman dan *harokah* (gerakan). Oleh sebab itu, Partai Keadilan Sejahtera memandang persoalan pembinaan (*tarbiyah*) menjadi sesuatu yang bersifat inti. “PKS ini kan partai islam yang lahir dari gerakan kampus dan setelahnya muncullah kader-kader Partai Keadilan sampai berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Gerakan kampus itulah yang disebut dengan istilah gerakan tarbiyah. Oleh karenanya tarbiyah itu juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep berpikir sehingga menjadi lebih baik layaknya seorang guru. Hal ini juga senada dengan pengertian Fakultas tarbiyah dalam ruang lingkup UIN. Secara ringkas tarbiyah dalam perspektif PKS merupakan sebuah konsep pemikiran yang berfungsi dalam mengevaluasi kebijakan dan strategi internal PKS sehingga ini menjadi sesuatu yang bersifat inti” (Kusnan, 2023).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera tidak setengah-setengah dalam merekrut pengkaderan, Partai Keadilan Sejahtera melakukan perekrutan dari bawah dan terstruktur sehingga kader yang dibina lebih berkembang dan dapat memahami tujuan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai politik.

Adapun sistem kaderisasi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berjenjang sesuai dengan tingkat kualitas dan loyalitas para kader adalah sebagai berikut:

- a. Anggota kader pendukung
 1. Anggota pemula, yaitu anggota yang telah lulus mengikuti Training Orientasi Partai.
 2. Anggota muda, yaitu anggota yang telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar satu
- b. Anggota kader inti
 1. Anggota madya, yaitu anggota yang telah lulus pelatihan kepartaian tingkat dasar 2.
 2. Anggota dewasa, yaitu anggota yang telah lulus pelatihan kepartaian tingkat lanjut.
 3. Anggota ahli, yaitu anggota yang telah lulus pelatihan kepartaian tingkat tinggi.
 4. Anggota purna, yaitu anggota yang telah lulus pelatihan kepartaian tingkat ahli.
 5. Anggota kehormatan, yaitu anggota yang berjasa dalam perjuangan partai dan

dikukuhkan oleh Majelis Pertimbangan Partai. Jenjang keanggotaan kader ini merupakan jenjang kaderisasi para anggota Partai Keadilan Sejahtera.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyiapkan kader partai politik yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Proses rekrutmen calon anggota partai politik harus diikuti dengan sistem seleksi yang ketat. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dalam artian siapa saja dapat mendaftar menjadi calon anggota partai politik. Seluruh calon yang mendaftar harus diseleksi dengan menggunakan berbagai teknik seleksi yang baik. Seleksi yang baik adalah seleksi yang menempatkan penilaian kompetensi sebagai indikator penilaian yang utama.
- b. Setelah anggota partai politik diterima, maka anggota partai politik hendaknya diberikan masa orientasi dan sosialisasi dalam rangka mengenal ideologi dan program-program kepartaian. Pemahaman yang baik mengenai ideologi partai dan pernik-perniknya akan menumbuhkan sikap loyalitas yang tinggi terhadap partai politik. Orientasi dan sosialisasi ideologi dan nilai-nilai kepartaian dapat memberikan penguatan bagi kader partai politik dalam memahami partainya. Dengan demikian, setiap anggota partai politik tidak akan mudah tergoyahkan untuk pindah atau bergabung dengan partai politik lain.
- c. Setiap anggota partai politik harus diberikan pembinaan yang baik. Materi pembinaan harus ditekankan terhadap masalah mental dan nilai-nilai moral. Pembinaan yang dilakukan oleh partai politik terhadap kader-kadernya setidaknya akan menjaga kesehatan jiwa setiap anggota partai politik. Hal tersebut berpotensi dalam membentengi diri anggota-anggota partai politik dari aktivitas-aktivitas yang merugikan publik.
- d. Partai politik harus mempersiapkan setiap kadernya untuk mengisi jabatan politik tertentu dengan memakai prinsip skala prioritas berdasarkan kecakapan. Kader partai yang dapat menunjukkan kinerja, integritas, serta loyalitas yang tinggi terhadap partai politik dan publik harus diberikan kesempatan dalam mengisi jabatan politik tertentu.
- e. Perlu adanya batasan masa bakti anggota partai politik, hal ini diperlukan dalam rangka menjaga kesehatan dan regenerasi dalam hal keanggotaan

partai politik. Partai politik perlu menilai batasan usia setiap kader demi terjaganya produktivitas setiap anggota partai politik. Dengan demikian proses regenerasi akan berjalan dengan baik sehingga semangat pembaharuan bagi bangsa Indonesia akan terus berkembang ke arah yang lebih baik.

- f. Partai politik perlu menerapkan sanksi tegas terhadap para kadernya yang telah terbukti melakukan pelanggaran, baik secara pidana maupun secara moral. Hal ini akan menimbulkan efek jera pada pelakunya dan anggota masyarakat pun akan bersimpati terhadap partai politik dikarenakan telah konsisten dan tidak pandang bulu dalam menegakkan disiplin partai terhadap setiap kader-kadernya yang melakukan kesalahan.
- g. Melalui pola kaderisasi di atas maka partai politik pun dapat menghasilkan kader-kader yang berkualitas tinggi sehingga menjadi pilihan rakyat dalam mengisi jabatan-jabatan politik baik ditingkat pusat maupun daerah (Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2017).

Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pematang Siantar Dalam Melahirkan Aspek Kepemimpinan Bagi Perempuan

Dalam undang-undang no 2 pasal 1 ayat 1 tahun 2011 tentang partai politik, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita yang diperjuangkan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan antara masyarakat sipil dengan pemerintah.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gerakan dakwah diberbagai kawasan dunia. Kegiatan dakwah tidak dapat dilepas untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu (1) faktor internal, seperti konsolidasi partai yang menyangkut rekrutmen anggota maupun pengkaderan anggota, popularitas partai, kampanye yang dilakukan partai pada saat pemilu. (2) faktor eksternal, seperti pelaksanaan pemilu

dan kondisi sistem politik yang sedang berlangsung (Adibah dan Jatiningih, 2022).

PKS Kota Pematang Siantar telah bertransformasi menjadi partai islam yang menempatkan perempuan sebagai sosok yang terhormat dalam dunia politik. Hal tersebut dapat dilihat dalam kebijakan PKS Kota Pematang Siantar untuk melahirkan aspek kepemimpinan politik terhadap kader-kader perempuan. Berikut ini merupakan kebijakan yang diambil oleh PKS Kota Pematang Siantar dalam melahirkan aspek kepemimpinan terhadap anggota/kader perempuan di PKS Kota Pematang Siantar:

Pertama, menjadi bagian dari struktur fungsional partai pada Badan Pengurus Harian (BPH). Secara umum fungsi dan tugas dari pengurus inti atau Badan Pengurus Harian adalah memberi saran dan masukan kepada Ketua Umum dalam mengambil kebijakan politik disuatu organisasi. Para kader perempuan di PKS Pematang Siantar mendapatkan posisi struktural and fungsional di Badan Pengurus Harian (BPH) PKS Kota Pematang Siantar. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Jannah sebagai berikut:

“PKS ini kan partai yang bersifat universal dalam berkeadilan termasuk juga dalam menempatkan posisi perempuan dalam berpolitik. Salah satu langkah yang diambil oleh PKS Pematang Siantar adalah menempatkan kaum perempuan yang berkualitas dan mumpuni serta profesional menjadi bagian dari struktur fungsional partai. Struktur fungsional partai itu disebut juga dengan Badan Pengurus Harian (BPH). Nah, perempuan juga diberikan jabatan dalam mengemban tugas di BPH PKS Kota Pematang Siantar asal dia berkualitas serta profesional dalam membagi tugas sebagai ibu rumah tangga dan anggota atupun pimpinan di BPH PKS Kota Pematang Siantar” (Jannah, 2023).

Menurut penjelasan diatas para kader perempuan di PKS Kota Pematang Siantar juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan kader Laki-laki. PKS Kota Pematang Siantar juga menghargai kodrat perempuan sebagai insan yang diberikan kesempatan dalam berkompetisi dengan kader laki-laki dipemilihan legislatif kota Pematang Siantar.

Kader perempuan di PKS Pematang Siantar mendapatkan tugas yang sama dengan kader laki-laki baik dikegiatan internal maupun dikegiatan eksternal. Dalam kegiatan internal, kader perempuan di PKS

Pematang Siantar ikut andil dalam pengambilan keputusan disetiap roda kegiatan partai. Sedangkan dalam kegiatann eksternal, PKS Kota Pematang Siantar memperkenalkan visi dan misi serta tujuan partai terhadap khalayak umum agar dapat memilih PKS di pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif. Pada kedua kegiatan tersebut, kader laki-laki maupun kader perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha melahirkan aspek kepemimpinan dimasing-masing pribadi kader.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PKS Kota Pematang Siantar melibatkan seluruh komponen tanpa memandang gender dan jenis kelamin. Kader perempuan PKS Pematang Siantar terlibat aktif dalam kegiatan eksternal dan internal kepartaian. Kegiatan dimulai dari merancang sampai aktif terlibat sebagai penggerak dan panitia kegiatan. Tujuan adanya kegiatan kepartaian adalah untuk melahirkan aspek kepemimpinan dan meningkatkan kualitas para kader serta dapat menarik simpati masyarakat terhadap PKS Kota Pematang Siantar. Hal ini juga bertujuan dalam melahirkan aspek kepemimpinan bagi para kader perempuan di PKS Kota Pematang Siantar dalam berpolitik ditengah-tengah masyarakat.

Kedua, kader perempuan yang berkualitas diusung menjadi calon legislatif. Didalam AD/ART pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa PKS merupakan partai yang berasaskan islam. Kontribusi kader perempuan dimulai dari rekrutmen kader perempuan. Menurut pasal 9 ayat 1 didalam AD/ART PKS menyatakan bahwa setiap warga negara indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi anggota PKS.

Relasi antara perempuan dan agama menjadi wacana yang sangat dibicarakan didalam PKS Kota Pematang Siantar. Kaum perempuan yang selalu diidentifikasi memiliki peran domestik dan kaum laki-laki memiliki peran diruang publik. Namun realitasnya kaum perempuan didalam partai memiliki ruang dan kesempatan untuk berjaya diranah publik. Tugas yang diberikan oleh PKS Kota Pematang Siantar terhadap kader perempuan juga sama halnya dengan tugas partai yang diberikan terhadap kader laki-laki. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Suhadi selaku Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Pematang Siantar.

“Memang didalam ajaran agama islam posisi perempuan berada dibawah kepemimpinan laki-laki. Sebab laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan.

Namun itu dalam konteks yang bersifat ibadah. Kalau dalam persoalan sosial bermasyarakat utamanya berpolitik islam memegang teguh keadilan dan persamaan hak. Dikarenakan didalam Al-Quran surah Al-baqarah: 30 Allah menggunakan bahasa "manusia" tanpa menyebutkan secara spesifik apakah itu laki-laki atau perempuan. Hal inilah yang menjadi dasar PKS Kota Pematang Siantar untuk tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berpolitik. Intinya semua harus diberikan kebebasan dan kesempatan secara bersama-sama dalam menjadi calon pemimpin bahkan menjadi pemimpin" (Suhadi, 2023).

Sesuai dengan penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya PKS Kota Pematang Siantar memberikan tugas yang setara antara kader partai laki-laki dan perempuan. Menurut bapak Suhadi, PKS memang memiliki ideologi yang berasaskan syariat islam. Namun kader perempuan yang memiliki kredibilitas, integritas, kapabilitas, dan elektabilitas akan terus diberikan kesempatan dalam berpolitik. Setiap kader perempuan di PKS Kota Pematang Siantar memiliki peran penting dalam setiap program kepartaian. Namun, kader perempuan di PKS Kota Pematang Siantar juga tidak melupakan tugas mereka sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan atau program kerja yang dilakukan oleh PKS Kota Pematang Siantar memiliki pengelolaan waktu tertentu seperti yang disampaikan oleh ibu Jannah sebagai berikut:

"Kader perempuan di PKS Pematang Siantar memiliki peran yang cukup penting dalam penguatan internal PKS Kota Pematang Siantar. Hal inilah yang menjadikan kader perempuan di PKS sangat sibuk dalam bekerja sesuai dengan posesioningnya masing-masing. Apalagi ditahun ini kita akan memasuki tahun-tahun pemilu. Namun demikian bukan berarti kader perempuan di PKS Kota Pematang Siantar melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Kader perempuan di PKS Pematang Siantar merupakan ibu di partai politik dan juga ibu dirumah tangga" (Jannah, 2023).

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh informan diatas, maka dapat dipahami bahwa kader perempuan diPKS Kota Pematang Siantar memiliki peran penting dalam setiap tugas kepartaian. Namun mereka juga tidak melupakan tugasnya sebagai ibu dalam berumah tangga.

Prinsip yang terkandung dalam PKS menyebutkan bahwasannya perempuan yang diusulkan untuk

menjadi calon anggota legislatif harus memiliki ridho atau izin dari keluarga. Bukan hanya kader laki-laki saja yang menjadi prioritas utama dalam partai, namun kader perempuan juga yang memiliki kualitas akan dicalonkan menjadi perwakilan partai dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif. Upaya lain yang dilakukan oleh PKS Pematang Siantar adalah tetap memberikan kesempatan terhadap kader perempuan untuk dapat memimpin tugas dan program kerja kepartaian diranah legislatif. Seperti yang disampaikan oleh bapak Suhadi selaku anggota Caleg Dapil Pematang Siantar Fraksi PKS sebagai berikut:

"Kader perempuan yang berkualitas serta memiliki modal yang cukup akan diajukan menjadi calon anggota DPRD atau calon kepala daerah melalui musyawarah antar pengurus inti di PKS Pematang Siantar. Sekalipun kader perempuan PKS belu mencapai kuota yang setara dengan kader laki-laki dalam hal pencalonan legislatif dan eksekutif, setidaknya PKS Kota Pematang Siantar telah bertransformasi menjadi partai politik islam yang menempatkan perempuan ditempat yang sebaik-baiknya, bisa jadi itu di legislatif dan bisa jadi di eksekutif. Asalkan mereka berkualitas, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, dikenal oleh masyarakat, serta memiliki modal yang cukup secara materi" (Suhadi, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa di PKS Kota Pematang Siantar tidak memandang gender dalam mengusungkan calon legislatif sebagai perwakilan partai. Hal tersebut merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh PKS Pematang Siantar dalam melatih aspek kepemimpinan bagi kader perempuan. Kader perempuan diPKS Kota Pematang Siantar harus memiliki hubungan yang baik dalam menjalin kerjasama politik. Juga harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara baik. Hal ini tentu berpengaruh dalam diri setiap kader perempuan diPKS Pematang Siantar dalam melatih aspek kepemimpinan sebagai perwakilan partai dilembaga legislatif.

KESIMPULAN

Rekrutmen politik merupakan proses partai dalam mencari anggota atau kader untuk berpartisipasi dalam proses politik. Partai Keadilan Sejahtera menggunakan dua strategi rekrutmen politik. Pertama adalah pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardhiyyah*) atau bentuk pendekatan orang-perorang yang meliputi komunikasi personal secara langsung. Kedua adalah pola rekrutmen institusional (*al-da'wah*

jama'ih) yang dilakukan secara formal atau tidak formal dengan memanfaatkan institusi-institusi sayap partai dalam meraup kader potensial. Dalam melahirkan aspek kepemimpinan terhadap kader perempuan, PKS Kota Pematang Siantar melakukan dua strategi, yaitu kader perempuan dijadikan sebagai bagian dari struktur fungsional partai di Badan Pengurus Harian dan kader perempuan yang berkualitas diberikan kesempatan untuk menjadi perwakilan partai dilembaga legislatif. Kader perempuan di PKS Pematang Siantar akan dilatih aspek kepemimpinan secara internal dengan cara menempatkan kader perempuan sebagai pengurus inti di Badan Pengurus Harian. Secara eksternal kader perempuan di PKS Kota Pematang Siantar akan dilatih aspek kepemimpinan dalam diri setiap kader perempuan yang dicalonkan menjadi perwakilan partai dilembaga legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani Melna. 2019. *Rekrutmen Dan Kaderisasi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum 2019 Oleh Partai Keadilan Sejahtera*. (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial), Vol.6, No.3.
- Adibah Naila Dan Oksiana Jatningsih. 2022. *Penguatan Bargaining Power Kader Perempuan Di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur Dalam Pengambilan Keputusan Atau Kebijakan Partai*. (Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan), Vol.10, No. 3.
- Assyaukanie Luthfi. 2011. *Ideologi Islam Dan Utopia*. Jakarta: Freedom Institute.
- Budiardjo Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- <https://pks.id/content/ad-art-pks> Di Akses Pada Tanggal 12 Juni 2023, Pukul 18.00.
- <https://pks.id> Di Akses Pada Tanggal 12 Juni 2023, Pukul 21.30.
- <https://www.dpr.go.id> Di Akses Pada 12 Juni 2023, Pukul 19.00.
- Imdadun M. Rahmat. 2008. *Ideologi Politik Pks: Dari Masjid Kampus Keadungan Parlemen*. Yogyakarta: Pt. Lkis Printing Cemelang.
- Jannah. (2023, Juni 10). Kabidpuan (Kepala Bidang Perempuan) DPW PKS Kota Pematang Siantar. Wawancara. Siantar.
- Jumali. (2023, Juni 3). Ketua DPW PKS Kota Pematang Siantar, Wawancara, Siantar.
- Katimin. 2017. *"Politik Islam: Studi Tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Medan. Perdana Publishing.
- Kusnan. (2023, Juni 5). Kader PKS Kota Pematang Siantar. Wawancara. Siantar.
- Labolo Muhadam Dan Teguh Ilham. 2007. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep, Dan Isu Strategis*. Cet. Ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mhd. Syahminan. 2009. *Madinah Al-Munawarah dan Masyarakat Madani (civil society)*. (Jurnal Pemikiran Islam, Kewahyuan, Politik, & Hubungan Antar Agama). No.36.
- Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera Oleh Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2007.
- Rasyid Anies Baswedan. 2004. *Politik Islam Di Indonesia: Lintasan Sekarang Dan Masa Depan*. (Jurnal Survei Asia), Vol.44, No.5.
- Suhadi. (2023, Juni 07). Anggota Caleg Dapil Pematang Siantar Fraksi PKS. Wawancara. Siantar.
- Susanti Susi Dan Adelita Lubis. 2015. *Partisipasi Partai Politik Perempuan Pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan*. (Jurnal), Vol.3. No.1.
- Yuniartin Titin. 2018. *Identitas Politik Partai Keadilan Sejahtera*. (Jurnal), Vol. 12. No. 2.